

Analisis Penerapan Akuntansi Pemerintahan Good Governance di Provinsi Jawa Barat

Anggi Khalid¹, Deliana Erica², Katarina N Hutapea³, Mawar N Br. Sitorus⁴, Sri Rizki⁵,
Sujatmiko Wibowo⁶, Arini^{7*}

^{1,2,3,4,5}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lancang Kuning

⁶Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pakuan

⁷Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lancang Kuning

*E-mail : arini@unilak.ac.id

Article Informations

Received:
(15-04-2023)

Accepted
(10-07-2023)

Available Online :
(01-08-2023)

Keywords

competence of internal accountants, principles of good government governance, accrual-based government accounting standards, quality of financial reporting.

Abstrak

This research was conducted against the backdrop of a phenomenon in which an Indonesian Supreme Audit Agency (BPK-RI) audit also explained particularly the poor quality of financial reporting by the Regional, Provincial and City District Governments. This research was investigated through a survey and supported by the existence of a theory to develop a research model designed to examine the quality of financial reporting from Local Governments that are relevant to the competence of Internal Accountants, the principle of good governance is the application of accrual-based government accounting standards. The previous survey was carried out for two years targeting the provincial/regency/city/district governments of West Java and Banten which reached 37 local governments. Data were analyzed using a structural equation model, processed using Smart PLS. The advantage of this research is that it can contribute scientifically to the science of public sector accounting and solve problems for local governments in implementing related tasks to improve the quality of local government financial reporting. The results of the study show that the competence of internal accountants has a significant effect on the quality of financial reporting, especially in local government. The principles of good governance and the application of accrual-based government accounting standards have a positive effect on regional government financial reports.

Pendahuluan

Pelaporan keuangan yang berkualitas buruk merupakan fenomena yang sering terjadi di Indonesia seperti pemerintah lokal, kementerian, lembaga dan juga perusahaan publik yang dicirikan oleh opini auditor yang buruk dan keterlambatan penyampaian laporan keuangan ke Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemerintah pusat berupaya mengatasi fenomena ini dengan menyusun RUU pada pelaporan keuangan. Dalam ikhtisar semester I tahun 2018, Supreme

Indonesia Badan Pemeriksa Keuangan (BPK, 2018) menyatakan bahwa salah satu kendala yang paling sulit untuk memenuhi syarat terutama masalah ketidakcocokan antara catatan dan keberadaan fisik aset dan nilai aset yang belum dinilai, dicatat kembali dalam setiap audit yang diadakan oleh BPK. Masalah tersebut disebabkan kurangnya kompetensi staf akuntansi di tingkat satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Akibatnya, pencatatan aset tidak dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (GAS; bahasa Indonesia Tertinggi Lembaga Audit, 2018).

Kompetensi tenaga akuntansi menjadi penentu dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Selain itu, kompetensi sumber daya manusia (SDM) meliputi pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan kepribadian karakteristik itu secara langsung memengaruhi pertunjukan (Mangkunegara, 2013), (Menhard & Safrizal, 2023), dan Pemerintah Peraturan Nomor 101/2000 mendefinisikan bagus pemerintahan sebagai mengembangkan dan menerapkan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan diterima oleh seluruh rakyat masyarakat. Jika pemerintah lokal menerapkan tata kelola yang baik dalam menjalankan aktivitas pemerintah daerah berlanjut dan beropareasi secara efektif. Keberlanjutan dari kegiatan pemerintah daerah sangat penting karena pemerintah dapat memberikan pelayanan dan pembinaan kepercayaan publik, yang menguntungkan semua pihak yang berkepentingan. Di seluruh dunia, termasuk Indonesia telah melakukan upaya untuk memahami prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip ini diperlukan untuk mencapai kinerja yang baik secara berkelanjutan.

Penerapan GAS berbasis akrual yang diterapkan pada tahun 2015 belum berjalan optimal (Penetapan, Seleksi, Makalah, Terbuka, & Pimpinan, 2019). Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa daerah menghadapi beberapa kendala dalam penerapan standar akuntansi baru, seperti kualitas SDM yang mengelola keuangan, kompetensi dan komitmen kepala daerah dalam mendorong optimalisasi penerapan laporan keuangan berbasis akrual di daerah (Penetapan et al., 2019). Sementara itu, pelaporan dengan basis akrual merupakan transaksi ekonomis atau akuntansi yang mudah dikenali, tercatat dan disajikan di dalam Pernyataan keuangan yang terjadi, tanpa memperdulikan waktu transaksi penerimaan atau pembayaran uang tunai. Pendapatan akrual (accrued revenue) adalah pendapatan yang telah diakui dalam laporan laba rugi tetapi uang tunai belum untuk periode akuntansi. Dengan kata lain, perusahaan telah menyediakan barang atau jasa sebelum menerima pembayaran uang tunai. Karena klien belum membayar, pendapatan akrual diakui sebagai aset, sebagai akun piutang usaha, dan pengeluaran terjadi ketika timbulnya kewajiban atau sumber daya dikonsumsi. Tujuan dari GAS berbasis akrual adalah untuk meningkatkan kualitas informasi pelaporan keuangan, memberikan gambaran posisi keuangan milik pemerintah dan informasi sebenarnya tentang hak dan kewajiban pemerintah. Akrual GAS menawarkan keuntungan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya pelayanan, efisiensi dan pencapaian tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) Apakah akuntan intern memiliki kompetensi untuk mempengaruhi kualitas dari pelaporan keuangan? (2) Apakah penerapan prinsip good governance berpengaruh signifikan terhadap kualitas dari pelaporan keuangan? (3) Apakah penerapan GAS berbasis akrual memiliki pengaruh yang signifikan pada kualitas pelaporan keuangan?

Tinjauan Pustaka

Kompetensi Intern Akuntan

Menurut Hitt, Ireland dan Hoskisson (2014), kompetensi yang merupakan kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, sikap dan pengalaman, memungkinkan kinerja yang unggul, yang meliputi pengetahuan, keterampilan intelektual, strategi atau kombinasi dari ketiganya yang dapat diterapkan setiap unit kerja.. Kemampuan untuk melakukan pekerjaan harus didukung oleh keterampilan, pengetahuan dan kerja sikap (Landy,FJ dan Conte,JM, 2016). Karena itu, kompeten intern akuntan harus memiliki sebuah kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, sikap dan pengalaman di dalam organisasi unit atau perusahaan. Di dalam daerah, kota dan provinsi pemerintah, intern akuntan disebut pelaksana akuntansi.

Prinsip dari tata kelola Pemerintahan yang baik

Menurut Sedarmayanti (2010:67) menjelaskan bahwa pengertian good governance sebagai berikut: “Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah sistem yang memungkinkan terjadinya mekanisme penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif dan efisien dengan menjaga sinergi yang konstruktif di antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat”. Pemerintah Peraturan Nomor 101 Tahun 2000 mendefinisikan pemerintahan yang baik sebagai pengembangan dan pelaksanaan prinsip dari profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, baik dalam melayani, demokrasi, efisiensi, efektifitas dan supremasi hukum sedemikian rupa sehingga dapat diterima oleh seluruh masyarakat (Safrizal et al., 2022). Menurut Bastian, I. (2014), pemerintahan yang baik akan membawa dampak tata kelola pemerintahan yang baik (struktur, fungsi, orang-orang, aturan, dll.). Kettani dan Moulin (2014) Potensi korupsi yang tinggi, tertutupan, prosedur yang berbelit dan memakan waktu (karena waktu tunggu dan jarak antar lokasi) menjadi tantangan dan hambatan utama penerapan e-Government di Maroko, sebuah negara di Afrika Utara, Bank Dunia (2006) mendefinisikan tata kelola yang baik dicerminkan oleh pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi, terbuka dan tercerahkan; birokrasi yang dijiwai dengan profesional jiwa khas suatu bangsa; badan eksekutif pemerintah yang bertanggung jawab atas tindakannya; dan masyarakat sipil yang kuat partisipasi di dalam urusan publik, dan semua berperilaku baik di bawah aturan hukum'.

Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua

Peraturan Menteri Dalam Negeri 64/2013 Pasal 1 ayat (10) menjelaskan bahwa akrual-berdasarkan standar akuntansi mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa pada saat transaksi itu terjadi, tanpa memedulikan kapan uang tunai diterima atau dibayarkan. Abdul dan Kusufi (2012) menyimpulkan bahwa akrual basis memenuhi tujuan pelaporan yang tidak dapat dipenuhi oleh kas basis. Pelaporan memiliki tujuan manajerial dan pengawasan. bahasa Indonesia Pemerintah Peraturan 71/2010 artikel 1 gugus kalimat (8) menyatakan mengikuti:

Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual merupakan standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan keuangan berbasis akrual, dan mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan

anggaran berdasarkan dasar yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Pendapatan Daerah dan Pengeluaran Anggaran (APBD).

Selanjutnya menurut Pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan (GGAS 01), standar berbasis akrual tersebut mewakili 'dasar akuntansi yang mengakui efek dari transaksi dan peristiwa lain ketika transaksi dan peristiwa itu terjadi, terlepas dari kapan uang tunai atau uang tunai setara adalah diterima atau dibayar'. Rusmana, Setyaningrum dan Yuliansyah (2017) menggunakan delapan prinsip di dalam akuntansi pemerintah dan pelaporan keuangan: akuntansi dasar, historis nilai prinsip, realisasi prinsip, zat prinsip mengungguli bentuk formal, prinsip periodisitas, prinsip konsistensi, pengungkapan lengkap prinsip, adil prinsip.

Kualitas dari Pelaporan Keuangan.

Kieso, Weygandt dan Warfield (2016) menyatakan bahwa kualitas pelaporan keuangan mengacu pada kualitas informasi akuntansi yaitu, karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Kualitas informasi dikelompokkan menjadi empat, yaitu: (1) kualitas intrinsik: akurasi, objektivitas, kepercayaan dan reputasi; (2) kualitas aksesibilitas: akses dan keamanan; (3) kualitas kontekstual: relevansi, nilai tambah, ketepatan waktu, kelengkapan dan jumlah dari data; dan (4) kualitas dari perwakilan: penafsiran, reda dari pemahaman, ringkas perwakilan dan konsisten perwakilan. Menurut Aula (2012) kualitas dari informasi terdiri dari relevansi, ketepatan waktu, akurasi, kelengkapan, dan meringkas. Selanjutnya, dimensi kualitas informasi akuntansi adalah relevan, ketepatan waktu, ketepatan, kelengkapan dan ringkasan (Aula (2012). Bastian (2014), kriteria untuk kualitas informasi sebagai berikut: 'Beberapa penting kualitas dari itu informasi terkandung di dalam keuangan pernyataan menurut ke GAS adalah pengertian, relevansi, keandalan dan keterbandingan.

Hipotesa Perkembangan

Oktarina, Raharjo dan Andini (2016) menjelaskan kualitas dari pejabat pemerintah daerah mempengaruhi kualitas dari pernyataan keuangan. Kompeten akuntan akan mampu memahami logika dari akuntansi. Kegagalan dari intern akuntan, khususnya di dalam daerah pemerintah, dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan menimbulkan kesalahan dalam ketidaksesuaian laporan keuangan dan laporan dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga akan mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Samukri (2015) menyatakan kompetensi dari pejabat pemerintah daerah memiliki sebuah pengaruh penting pada kualitas dari pernyataan keuangan. Pejabat pemerintah yang kompeten di bidang akuntansi akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan Murapi (2017), kemampuan SDM dan organisasi tim berpengaruh signifikan terhadap kualitas kerja satuan informasi keuangan.

Jika pegawai negeri melaksanakan kegiatan suatu pemerintahan daerah dapat melaksanakan dengan baik prinsip tata kelola, pelayanan pemerintah akan lebih baik. Samukri (2015) menganalisis bagaimana menerapkan prinsip dari pemerintahan yang baik dapat berpengaruh pada kualitas laporan keuangan, dan hasilnya mengungkapkan pengaruh yang sangat signifikan terhadap pelaksanaan pemerintahan yang baik dan keandalan dari pernyataan keuangan. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, dapat mengurangi terjadinya kecurangan atau kesalahan dalam

reliabilitas pernyataan keuangan. Khan, Serafim dan Yoon (2016) melakukan penelitian serupa, studi ini mengharapkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten dapat memperbaiki kualitas milik pernyataan keuangan perusahaan (Oktarina et Al., 2016).

Muda dkk. (2017) dan Oktarina dkk. (2016) berpendapat bahwa penerapan standar akuntansi mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan. Jadi, jika pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah menggunakan prinsip keuangan pemerintah maka kualitas dari pernyataan keuangan akan semakin baik. Namun, menurut Triwardana (2017), penerapan GAS tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas Lembaga Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Metode Penelitian

Penelitian ini terbatas pada artikel yang diterbitkan dalam English Impact Factor Journal. Dengan kata lain, artikel yang dipilih dalam penelitian ini harus dipublikasikan pada platform (jurnal) yang mapan dan terkenal dengan pengindeksan yang memadai. Hal ini untuk memastikan bahwa artikel tersebut dianggap sebagai jurnal peer-review yang ditulis oleh seorang ahli dan direview oleh beberapa ahli lain sebelum diterbitkan dalam jurnal. Pendekatan tinjauan sistematis berbasis konsep yang diusulkan oleh Webster dan Watson (2002) diimplementasikan dalam tinjauan saat ini. Metode ini melihat literatur dalam hal konsep yang disajikan oleh semua penulis, bukan dari pendekatan yang dipimpin penulis yang melihat bagaimana setiap penulis menganalisis beberapa konsep dalam artikel yang berbeda (Webster dan Watson,).2002).

Metode ini akan sangat membantu Anda untuk mendapatkan penelitian yang relevan dengan lebih mudah. Bahkan, dari September 2015 hingga Januari 2016, penelitian ini memulai survei mesin pencari basis data utama (Scencedirect, Emeraldinsight, EBSCO, Google Scholar, dll.) untuk mengumpulkan artikel yang relevan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sehingga hasil data akan dianalisis dan di paparkan secara teoritis tanpa adanya data numerik dengan teknik pengumpulan data dengan cara studi literatur melalui jurnal penelitian terdahulu.

Hasil dan Pembahasan

Hipotesis pertama menyangkut pengaruh kompetensi akuntan internal terhadap keuangan pelaporan kualitas. Hasil tes menunjukkan Kompetensi akuntan intern memiliki peran penting dalam mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Jika pengaruh berdampak positif, menunjukkan akuntan intern yang berkompeten terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hasil ini sejalan dengan Murapi (2017) yang menemukan bahwa kemampuan Human Resource dan tim organisasi memiliki efek penting pada kualitas dari sebuah kerja unit informasi keuangan. Xu, H. Nord, D. Nord dan Lin (2003) sependapat bahwa faktor kunci kualitas akuntansi informasi. Mereka mengungkap bahwa SDM, sistem, organisasi dan faktor eksternal sangat penting dalam menentukan kualitas informasi akuntansi. Dengan adanya Kompetensi akuntan intern yang baik, khususnya di dalam lingkungan pemerintahan daerah, dapat memperbaiki kualitas pelaporan keuangan.

Hasil dari hipotesis kedua menunjukkan bahwa prinsip-prinsip good governance berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Jika arah pengaruhnya positif,

semakin besar komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan semakin besar kualitas pelaporan keuangan yang lebih baik. Sebaliknya, semakin buruk tata kelolanya, semakin buruk pula kualitas pelaporan keuangan. Hasil ini sejalan dengan Crowther (2018) dan Muda et al. (2017), yang menunjukkan bahwa penerapan good governance dan standar akuntansi pemerintahan mempengaruhi kualitas informasi keuangan OPD di Kota Banda Aceh. Hasil dari Fazny dan Setiyawati (2019) dan Setiyawati (2014) juga menunjukkan bahwa menerapkan prinsip-prinsip kebaikan governance berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Setiyawati dan Doktoralina (2019) juga menemukan penerapan prinsip-prinsip good governance mempengaruhi kualitas informasi akuntansi. Yusniyar dan Abdullah (2016) memperoleh hasil yang sama dan menyimpulkan bahwa tata kelola yang baik berpengaruh positif dan moderat terhadap kualitas laporan keuangan. Fenomena rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di provinsi Jawa Barat khususnya Banten, terkait dengan rendahnya penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Akhirnya, hasil yang berkaitan dengan hipotesis ketiga menunjukkan bahwa penerapan berbasis akrual GAS berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Arah pengaruhnya adalah positif, artinya jika GAS berbasis akrual diimplementasikan dengan baik, maka kualitas pelaporan keuangan akan meningkat, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan fakta di lapangan diketahui bahwa masih ada pemerintah daerah di provinsi Jawa Barat khususnya Banten yang memperoleh opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Hal ini disebabkan oleh kurangnya SDM untuk kontrol berbasis akrual sistem akuntansi, dan juga banyak kepala bidang akuntansi sebuah perusahaan yang tidak memiliki latar belakang akuntansi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Nugraeni dan Budiantara (2015) dan Yahya, Hasibuan, Torong dan Muda (2018), yang menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas informasi. Zainuddin dan Setiyawati (2019) menyatakan aplikasi GAS berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Nugraeni dan Budiantara (2015) memperoleh hasil yang sama dan menegaskan bahwa GAS berpengaruh langsung terhadap kualitas keuangan pernyataan. Dengan demikian, fenomena buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di provinsi Jawa Barat khususnya Banten dapat ditelusuri dari kurangnya SDM yang mengontrol akrual berdasarkan sistem akuntansi.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Kompetensi akuntan internal berpengaruh sangat signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Jika kompetensi dari akuntan intern baik maka kualitas dari laporan keuangan akan baik. Kompetensi akuntan internal yang memadai memungkinkan terjadinya kualitas yang akuntabel dan pelaporan keuangan yang transparan yang dapat menjadi dasar keputusan pemerintah daerah. Selanjutnya, prinsip tata kelola yang baik berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Penerapan good governance berupa transparansi, partisipasi dan akuntabilitas berperan dalam menghasilkan laporan keuangan yang baik. Apalagi penerapan GAS berbasis akrual berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Jika standar akuntansi diimplementasikan dengan baik, maka kualitas dari pelaporan keuangan akan

meningkat. Rendahnya kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah yang terjadi di Indonesia pada umumnya disebabkan karena kurangnya SDM dalam mengendalikan sistem akuntansi berbasis akrual.

Saran

Pemerintah harus berupaya meningkatkan kompetensi internal akuntan melalui pelatihan berkelanjutan maupun pendidikan lanjutan untuk akuntan yang ada serta perekrutan akuntan baru yang benar-benar kompeten untuk memenuhi syarat. Hasil penelitian ini adalah mengikuti temuan BPK RI bahwa penyebab utama rendahnya kualitas laporan keuangan dikarenakan kurangnya kompetensi staf akuntansi yang tidak memenuhi syarat Governmental Accounting Standards (GAS). Penerapan prinsip-prinsip good governance harus ditingkatkan agar kualitas dari pelaporan keuangan meningkat dan menghasilkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah Jawa Barat khususnya Banten. Mengenai berbasis akrual Governmental Accounting Standards (GAS), pemerintah sebaiknya memperketat pengawasan pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan penerapannya berbasis akrual GAS (Governmental Accounting Standards) merupakan kewajiban yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71/2010, menurut semua instansi pemerintahan harus menerapkan berbasis akrual Governmental Accounting Standards (GAS).

Daftar Pustaka

- Abdul, H., & Kusufi, M. S. (2012). Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Empat (Edisi 4). Jakarta, Indonesia: Salemba Empat.
- Aula, J. (2012). Akuntansi informasi sistem . Cengage Sedang belajar.
- Bastian, I. (2014). Audit Sektor Umum: Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintahan .Edisi Tiga. Jakarta: Salemba Empat .
- Crowther, D. (2018). Kritik Sosial Pelaporan Perusahaan: Sebuah Analisis Semiotik Pelaporan Keuangan dan Lingkungan Perusahaan: Analisis Semiotik Perusahaan Keuangan dan Lingkungan Pelaporan (1st Edisi). London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315186047>
- Fazny, AO, & Setiyawati, H. (2019). Pengaruh Penerapan Pengendalian Intern Sistem dan itu Penerapan dari Bagus Perusahaan Pemerintahan Prinsip pada itu Kualitas dari Keuangan Laporan (Kasus Belajar pada Amanah Insani Islam Masyarakat Pembiayaan Bank). Jurnal Internasional Sains dan Penelitian , 8 (5), 20–31.
- Hitt, MA, Irlandia, RD, & Hoskisson, RE (2014). Manajemen strategis: Konsep: Daya saing dan globalisasi . Pendidikan Nelson.
- Kettani, D., & Moulin, B. (2014). E-pemerintah untuk pemerintahan yang baim di dalam mengembangkan negara: Bukti empiris dari itu eFez proyek . Pers Lagu Kebangsaan.
- Khan, M., Serafeim, G., & Yoon, A. (2016). Keberlanjutan perusahaan: Bukti pertama materialitas. Itu Tinjauan Akuntansi , 91 (6), 1697–1724.
- Kieso, DE, Weygandt, JJ, & Warfield, TD (2016). Akuntansi Menengah, Binder Siap Versi . John Wiley & Sons.

- Landy, FJ, & Conte, JM (2016). *Bekerja di abad ke-21, versi siap Binder: An pengantar ke Industri dan Psikologi Organisasi*. John Wiley & Anak laki-laki.
- Mangkunegara, AAAP (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan* (Edisi Kese). Bandung, Jawa Barat Indonesia: PT. Remaja Rosdakarya.
- Menhard, M., & Safrizal, S. (2023). *Peranan Etika dan Komitmen Organisasi dalam Budgetary Slack*. 05(02), 5084–5094.
- Menteri dari Rumah urusan Peraturan 64. Republik Indonesia (2013).
- Muda, I., Wardani, DY, Maksum, A., Lubis, AF, Bukit, R., & Abubakar, E. (2017). Itu Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penggunaan Teknologi Informasi Tentang Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Akuntansi Daerah Sistem Sebagai Intervensi. *Jurnal Teknologi Informasi Teoritis & Terapan*, 95 (20), 5552–5561.
- Murapi, I. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Lombok Tengah). *InFestasi*, 12 (2), 131–143.
- Nugraeni, N., & Budiantara, M. (2015). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 12 (1).
- Oktarina, M., Raharjo, K., & Andini, R. (2016). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kota Semarang (Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Satu set Daerah Kota Semarang Tahun 2014). *Jurnal Dari akuntansi*, 2 (2).
- Penetapan, P., Seleksi, H., Makalah, P., Terbuka, S., & Pimpinan, J. (2019). Menerapkan Sistem Akuntansi Akrual di Daerah Belum Optimal Post Lainnya 744 orang Calon Pamong Praja Muda IPDN Akan Dilantik, 3–5
- Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 71. Standar Akuntansi Keuangan (2010). bahasa Indonesia Tertinggi Audit Lembaga. (2018). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II. Jakarta, Indonesia: BPK RI. Diperoleh dari <https://www.bpk.go.id/ihps> _
- Safrizal, S., Taufik, T., & Basri, Y. M. (2022). Good Governance on Village Fund Management with The Use of Information Technology as A Moderating Variable. *Indonesian Journal of Economics, Social, and Humanities*, 4(1), 15–28. <https://doi.org/10.31258/ijesh.4.1.15-28>
- Samukri. (2015). Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan Pelaksanaannya Sistem Informasi Akuntansi Keuangan terhadap Kualitas Informasi Akuntansi. *Riset Jurnal Keuangan dan Akuntansi*, 6 (11), 156–167.
- Sedarmayanti, H. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia; Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Reflika Aditama.
- Sekaran, AS, & Lilin, R. (2016). *Riset Metode untuk Bisnis: Keahlian Bangunan Mendekati* (Edisi ke-7). John Wiley & Sons.
- Setiyawati, H, & Doktoralina, C. (2019). Pentingnya informasi akuntansi yang berkualitas pengelolaan pemerintahan daerah di Indonesia. *Surat Ilmu Manajemen*, 9 (12), 2083–2092.
- Setiyawati, Hari. (2014). Itu Memengaruhi dari itu Penerapan dari Bagus Perusahaan Pemerintahan Prinsip dan itu Efektivitas dari Intern Kontrol Sistem Penyingkapan dari

- Akuntansi Lingkungan dan Implikasinya Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi di Rumah Sakit BUMN dan Swasta. *Jurnal Penelitian Keuangan dan Akuntansi* , 5 (24), 172–178. Itu Pemerintah Peraturan 101. Republik dari Indonesia (2000).
- Triwardana, D. (2017). Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar). *Jom Fekon* , 4 (4), 641–655.
- Xu, H., Klakson Nord, J., Daryl Nord, G., & Lin, B. (2003). Kunci masalah dari akuntansi manajemen kualitas informasi: studi kasus Australia. *Manajemen Industri & Data Sistem* , 103 (7), 461–470.
- Yahya, SAYA., Hasibuan, R. P. S., Torong, Z. B., & Muda, SAYA. (2018). Faktor itu pengaruh keberhasilan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual di pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Manajemen Informasi dan Ilmu Keputusan* , 21 (1), 1–14.
- Yusniyar, D., Abdullah, S., & yang lain. (2016). Pengaruh Menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Pengendalian Magang terhadap Bagus Pemerintahan dan Dampaknya pada Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada SKPA Pemerintah Aceh). *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah* , 5 (2).
- Zainuddin, & Setiyawati, H. (2019). Multidisiplin. *EPRA Internasional Jurnal dari Multidisiplin Penelitian* , 5 (1), 39–46.